

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba & Mulada, D. A., 2021. *Hukum Hak Tanggungan*. Rawamangun: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Aryatie, I. R., Moechthar, O. & Widjaja, A. M., 2022. *Pemahaman Seputar Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Ayuni, A. D., M. & Asmarudin, I. 2024. *Penggunaan Blockchain dalam Pengelolaan Data Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura*. Jakarta: Penerbit NEM.
- Beritno. 2023. *Hukum Pertanahan Mengurangi Problematika Sengketa Tanah*. Palangka Raya. CV. Diva Pustaka.
- Bobby, M. 2022. *Sertipikat Elektronik sebagai Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Syariah*. Palembang: Guepedia.
- Diantha, I. M. P. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dillah, H. P., & Suratman, H. 2015. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Medaline, O. 2024. *Pembaharuan Hukum Pendaftaran Tanah: Narasi Epistemik Pendaftaran Tanah dalam Tatanan Pemberlakuan UU Cipta Kerja*. Medan: USU Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press.
- Navisa, F. D. & S. 2024. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Nugroho, Dkk. 2020 . *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan.; Oase Pustaka.

- Patittingi, F. & Oktaviani. 2024. *Implementasi QR (Quick Response) Code pada Sertipikat Tanah Elektronik*. Makassar: Tohar Media.
- Ramdhan, M. 2021. *Metode penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Samadikun, M. Y. 2023. *Buku Petunjuk Penggunaan Permendagri 83 Tahun 2022 Lampiran B Pemerintah Daerah ; Menuju Perbaikan Kearsipan di Daerah Melalui Kode Klasifikasi Arsip*. Jakarta: Nas Media Pustaka.
- Sulaiman, Y., Malihah, E. & Delanova, M. O. 2023. *Proceedings of the International Conference on Social, Politics, Administration, and Communication Sciences (ICoSPACS 2022)*. Bandung: Springer Nature.
- Sutedi, A. 2023. *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyadi, Y. 2023. *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Rawamangun: Penerbit Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- Yulianti, A. 2022. *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Zuria, N. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zainuddin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Buku Referensi

- Juknis Nomor: 3/Juknis-HR.02/III. (2024). *Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik No. 3/Juknis-HR.02/III/2024 (versi 1.0)*.

Artikel Dalam Jurnal

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130.

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.41314>
- Andi Tenri, & Zainul Abidin. (2023). Kualitas pelayanan sistem komputerisasi warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 62–74.
- Arnia, S. (2022). Pelepasan hak atas tanah yang berasal dari redistribusi tanah untuk kepentingan perseroan terbatas.
- Assidiqih, G., & Susilowati, I. F. (2021). Tinjauan Yuridis Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum, Salam* 2020, 57–72.
- ATR/BPN, K. A. dan T. R. B. P. N. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. 4–6.
- BPS. (2020, September 27). Retrieved from Letak Geografis Kabupaten Bangli: <https://banglikab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTY4IzE=/letak-geografis-kabupaten-bangli.html>
- Bening, W., & Rafiqi, I. D. (2023). Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 265–298. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298>
- Christiana Sri Murni, Sumirahayu Sulaiman, (2022). Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Lex librum: jurnal ilmu hukum*. (8): 183-198.
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan

- Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 486-494.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.
- Dewi, R. A. R. M., & Susantio, C. (2024). Penggunaan Sertipikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(9), 3382–3392.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1441>
- Dantes, K. F. (2022). Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 527-536.
- Febriana Sulistya Pratiwi. (2022). Kebijakan Hukum Kementerian Atr/Bpn Terhadap Pencegah Mafia Tanah Daam Basis Penerapan Sistem PendaftaranTanah.<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>
- Herawza, M. F., Surial, M., Elyunusi, Z., Chandra, I., & Pratiwi, A. A. (2023). Efisiensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah. *Unes Law Review*, 6(1), 2330–2337. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> Indriani, I.,
- Herman, K., Iryani, D., Butarbutar, R., & Nurmawati, B. (2023). Sertipikat-El Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 3607–3617.
- Indra, J. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Elektronik Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas Sulawesi Barat). *Artikel Elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. (n.d.). Dashboard Data

Elektronik.

Retrieved January 31, 2025, from <https://aplikasi.atrbpn.go.id/dashboard/dataelektronik/>

Kunci, K. (2024). Tinjauan Hukum Penerapan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia. 4(8), 648–657.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Marune, S. M. E. A. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73–81. <http://jurnal.anfa.co.id>

Masri, E., & Hirwansyah. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik

Masri, E., & Hirwansyah. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157–174. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>

Mendoza, S. D., Nieweglowska, E. S., Govindarajan, S., Leon, (2020). Tinjauan Yuridis Sertipikat Hak Tanggungan Yang Di Terbitkan Melalui Sistem Elektronik Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Grati. *Nature Microbiology*, 3(1), 641.

Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, & Ketut Sudiatmaka. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 113–114.

Noer, R. T., Salsabila, S., Niravita, A., Fikri, M. A. H., & Nugroho, H. (2024). Transformasi Digital Pendaftaran Tanah: Tantangan Dan Efektivitas Implementasi Aplikasi Sentuh Tanahku Dalam Era Society 5 . 0. *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)*, 1(6), 250–261.

Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertipikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 835. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178>

Prasetya, F., & Afif Mahfud, M. (2023). Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 78–89. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30581>

Puspita, E. F. D., & Supriyo, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Tanah Elektronik. *Pagaruyuang Law Journal*, 182–207.

Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No. 3), 34–46.

Sahfitri, V. (2012). Pengukuran Efektivitas Sistem Informasi. *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 14(3), 205–216.

Shabranah, A. N., Maskun, M., & Aswan, M. (2023). Sertipikat Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi. *UNES Law Review*, 5(4), 3648–3657.

Artikel Elektronik

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (n.d.). Dashboard Data Elektronik. Retrieved January 31, 2025, from <https://aplikasi.atrbpn.go.id/dashboard/dataelektronik/>

BPN Bangli. (2025, 28 Februari). *Informasi layanan tanah Bangli*. Kabupaten Bangli. <https://kab-bangli.atrbpn.go.id>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia. Lembaran negara 1960 Nomor 104. Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 251

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 196

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461

